

BPK PERWAKILAN PROVINSI NTB

# KLIPING BERITA

Sumber : Lombok post

28 Mei 2023

Bima - Dompu

## BPK Bongkar Perjalanan Dinas Fiktif Rp 321 Juta di Pemkot Bima

Editor: Baiq Farida  28 Mei 2023



PEMKOT BIMA: Gedung kantor Wali Kota Bima. Perjalanan dinas di tiga OPD Bima menjadi temuan BPK. (dok.Lombok Post)

**KOTA BIMA**—Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bima diduga memiliki belanja perjalanan dinas fiktif. BPK NTB menemukan total anggaran bermasalah tersebut sebesar Rp 321 juta.

Belanja perjalanan dinas yang dibayarkan ini terdiri dari uang harian, biaya transportasi, dan biaya penginapan/akomodasi. Tiga OPD yang diendus tersebut yakni di Bagian Prokopim Kota Bima, Dinas Kesehatan Kota Bima, dan DPRD Kota Bima.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2022 serta bukti pertanggungjawaban di tiga OPD itu terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak nyata Rp 295.291.819.

Lembaga auditor ini menemukan juga pelaksanaan perjalanan dinas di luar tanggal surat tugas Rp 11.450.000. Lalu bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak riil senilai Rp 11.519.000. Ditambah kelebihan pembayaran perjalanan dinas akibat kesalahan perhitungan bendahara senilai Rp 3.640.000.

Menurut BPK, kondisi ini disebabkan Sekda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan, dan Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan satuan kerjanya. Pejabat penatausahaan keuangan Dinas Kesehatan juga kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas kebenaran komponen biaya dalam bukti pertanggungjawaban.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Sekretariat DPRD, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Prokopim belum optimal menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran.

Terhadap permasalahan tersebut, Pemkot Bima menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK. Wali Kota Bima diminta memerintahkan Sekda untuk mengembalikan ke kas daerah atas sisa kelebihan pembayaran realisasi belanja perjalanan dinas Rp 314.267.819.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bima H Mahfud mengatakan, catatan BPK itu merupakan pemeriksaan secara komprehensif dan harus diperbaiki.

Terkait rekomendasi seperti pengembalian semua temuan kerugian negara, dia menegaskan, akan ditindaklanjuti. "Tentu sebagai pemerintah memandang perlu catatan itu akan diperbaiki. Kekurangan-kekurangannya akan dilengkapi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya. **(man/r8)**